

LAKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN SIBOLGA UTARA
TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
KECAMATAN SIBOLGA UTARA
JALAN MAYJEND AGUS MARPAUNG NO. 01
SIBOLGA 22513
2025

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Singkat Organisasi.....	3
1.2.1 Profil Umum Wilayah.....	3
1.2.2 Susunan Organisasi	5
1.2.3 Kondisi Eksisting Sumber Daya Aparatur	8
1.2.4 Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana.....	10
1.3 Dasar Hukum Penyusunan.....	11
1.4 Sistematika Penyusunan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Kinerja	15
2.1.1 Visi dan Misi.....	15
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024...29	
3.1.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	30
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	31
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan	

	Standar Nasional/Provinsi.....	
3.1.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	
3.1.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	
3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	
3.2	Realisasi Anggaran	33

BAB IV PENUTUP.....38

4.1	Tinjauan Umum	38
4.2	Tinjauan Khusus	39

KATA PENGANTAR

Instansi pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing yang wajib dijalankan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari berjalannya roda pemerintahan sehingga setiap instansi pemerintah memiliki peran masing-masing yang wajib dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah dilakukan secara periodik yang merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 yang di implementasikan dalam bentuk laporan pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Laporan instansi pemerintah Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga Tahun 2024 dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang memuat tentang seluruh kegiatan dan pelayanan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024. Melalui LKJiP ini gambaran kinerja Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga dapat dilihat dengan jelas dan sistematis untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi maupun berbagai kemajuan yang dicapai selama tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024 Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga memberikan gambaran kinerja yang masih jauh dari kesempurnaan sehingga sangat dibutuhkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan, untuk ditelaah dan dijadikan bahan selanjutnya.

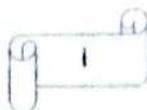
Sibolga, 02 Januari 2025

CAMAT SIBOLGA UTARA



SANTI PANGGABEAN, S.H
PENATA TK. I

NIP. 19810221 200903 2 006



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dilapangan untuk mencapai tujuan nasional. Kecamatan juga berperan penting melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sekaligus mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh wilayah kecamatan tersebut berada.

Pertumbuhan dan perkembangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kinerja kecamatan sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan kecamatan menempatkan target yang dijadikan sebagai salah satu dasar untuk mengukur kinerja. Kinerja menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang telah dilaksanakan sehingga dapat diketahui sejauh mana pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah sebagai salah satu komponen untuk mengetahui kemajuan sebuah bangsa.

Kecamatan Sibolga Utara sebagai salah satu organisasi perangkat daerah memiliki peran dalam pertumbuhan dan perkembangan Kota Sibolga pada khususnya. Kecamatan Sibolga Utara beserta seluruh perangkat Kecamatan Sibolga Utara mendedikasikan diri untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Sibolga Utara. Tahapan-tahapan yang kemudian dilaksanakan untuk melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan untuk tiap-tiap tahap perencanaan senantiasa dikaitkan dengan pemahaman mendalam akan kedudukan dan fungsi baru yang dimiliki oleh Kecamatan Sibolga Utara saat ini dalam tata dan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lingkungan Organisasi Pemerintah Kota Sibolga. Sementara kandungan isi dari dokumen perencanaan sepenuhnya mengacu kepada

fungsi-fungsi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Agar penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, maka sebisa mungkin harus dihindari terjadinya penguatan fenomena kesenjangan informasi yang terjadi antara Kecamatan Sibolga Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan desentralisasi bersifat atributif dan delegatif yang diberikan oleh Walikota Sibolga dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*), karena fenomena tersebut telah menyebabkan timbulnya kesalahpahaman dalam mengaplikasikan berbagai kebijakan di lapangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pengimplementasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu merupakan salah satu bentuk dari upaya yang dilakukan untuk mengatasi adanya fenomena kesenjangan informasi tersebut, dimana informasi kinerja Kecamatan Sibolga Utara disiapkan, disusun dan disampaikan secara tertulis, periodik dan terlembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawaban Camat Sibolga Utara kepada Walikota Sibolga.

Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/komunikasi capaian kinerja Camat Sibolga Utara selama kurun waktu tahun anggaran 2024 berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Komitmen dimaksud merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini secara normatif berupaya mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan laporan ini, selain digunakan sebagai bahan evaluatif bagi seluruh pejabat struktural dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Sibolga Utara menyangkut pengukuran tingkat pencapaian keberhasilan dan faktor penghambat pengimplementasian program dan kegiatan di Kecamatan Sibolga Utara kurun waktu tahun 2024, juga dimaksudkan sebagai alat kontrol tertulis bagi Pimpinan dalam menilai kinerja Camat Sibolga Utara selama kurun waktu satu tahun. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan pelengkap untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Sibolga dan Laporan Walikota Sibolga menyangkut Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Sibolga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga, serta bahan penyusunan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Kota Sibolga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

1.2 Gambaran Singkat Organisasi

1.2.1 Profil Umum Wilayah

Pembentukan Kecamatan Sibolga Utara secara yuridis formal diakomodasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 50) tentang Pembentukan Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Kota Dan Kecamatan Binjai Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Barat, Kecamatan Siantar Utara dan Kecamatan Siantar Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar, Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga Kota Dan Kecamatan Sibolga Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Dalam Wilayah Propinsi Tingkat I Sumatera Utara,

dan diresmikan keberadaannya oleh Gubernur KDH Tk. I Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 April 1982.

Dari perspektif fisiografis, Kecamatan Sibolga Utara terbentang mulai dari arah Timur dimana Bukit Barisan berada hingga ke arah Barat menghadap Teluk Tapian Nauli ini, dan secara geografis terletak pada garis 96° BT dan 1° LU serta berada pada ketinggian 1 – 50 m di atas permukaan laut (dpl). Total luas wilayah yang dimiliki oleh Kecamatan Sibolga Utara adalah $3,33 \text{ Km}^2$, terdiri dari $1,63 \text{ Km}^2$ (48,95 %) wilayah daratan dengan penggunaan utama sebagai *urban growth area* dan $1,70 \text{ Km}^2$ (51,05 %) wilayah lautan. Luas wilayah ini terbagi habis ke dalam 5 (lima) wilayah Kelurahan, dengan komposisi wilayah masing-masing : Kelurahan Sibolga Ilir dengan luas wilayah $0,78 \text{ Km}^2$, Kelurahan Simare-mare dengan wilayah $0,71 \text{ Km}^2$, Kelurahan Angin Nauli dengan luas wilayah $0,87 \text{ Km}^2$, Kelurahan Huta Tonga-Tonga dengan luas wilayah $0,40 \text{ Km}^2$ dan Kelurahan Hutabaringan dengan luas wilayah $0,57 \text{ Km}^2$. Komposisi wilayah terbesar masuk ke dalam Kelurahan Hutabaringan (26%) sementara komposisi wilayah terkecil berada di Kelurahan Huta Tonga-Tonga (11%).

Secara administratif, Kecamatan Sibolga Utara memiliki batas-batas wilayah pemerintahan sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sibolga Kota;
- Timur : berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Barat : berbatasan dengan Teluk Tapian Nauli.

1.2.2 Susunan Organisasi

Kecamatan Sibolga Utara merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi salah satu unsur penunjang Pemerintahan Daerah di Kota Sibolga, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Sibolga melalui Sekretaris Daerah Kota Sibolga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13) dan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Sibolga yang didalamnya terdapat struktur organisasi Kecamatan Sibolga Utara yang terdiri dari 1 (satu) jabatan struktural eselon III.a, 5 (lima) Jabatan struktural eselon IV.a dan 2 (dua) jabatan struktural eselon IV.b dengan dukungan staf/fungsional umum dan kelompok jabatan fungsional. Struktur ini masih dilengkapi dengan dukungan para pejabat fungsional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta para pejabat fungsional dari instansi vertikal yang ada di Kecamatan Sibolga Utara.

Secara struktural, kedudukan para pejabat fungsional dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang ada di Kecamatan Sibolga Utara dalam struktur organisasi Kecamatan Sibolga Utara merupakan implementasi atas pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang menyebutkan bahwa Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan di sekitarnya dan Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan serta Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Camat Sibolga Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota, dan

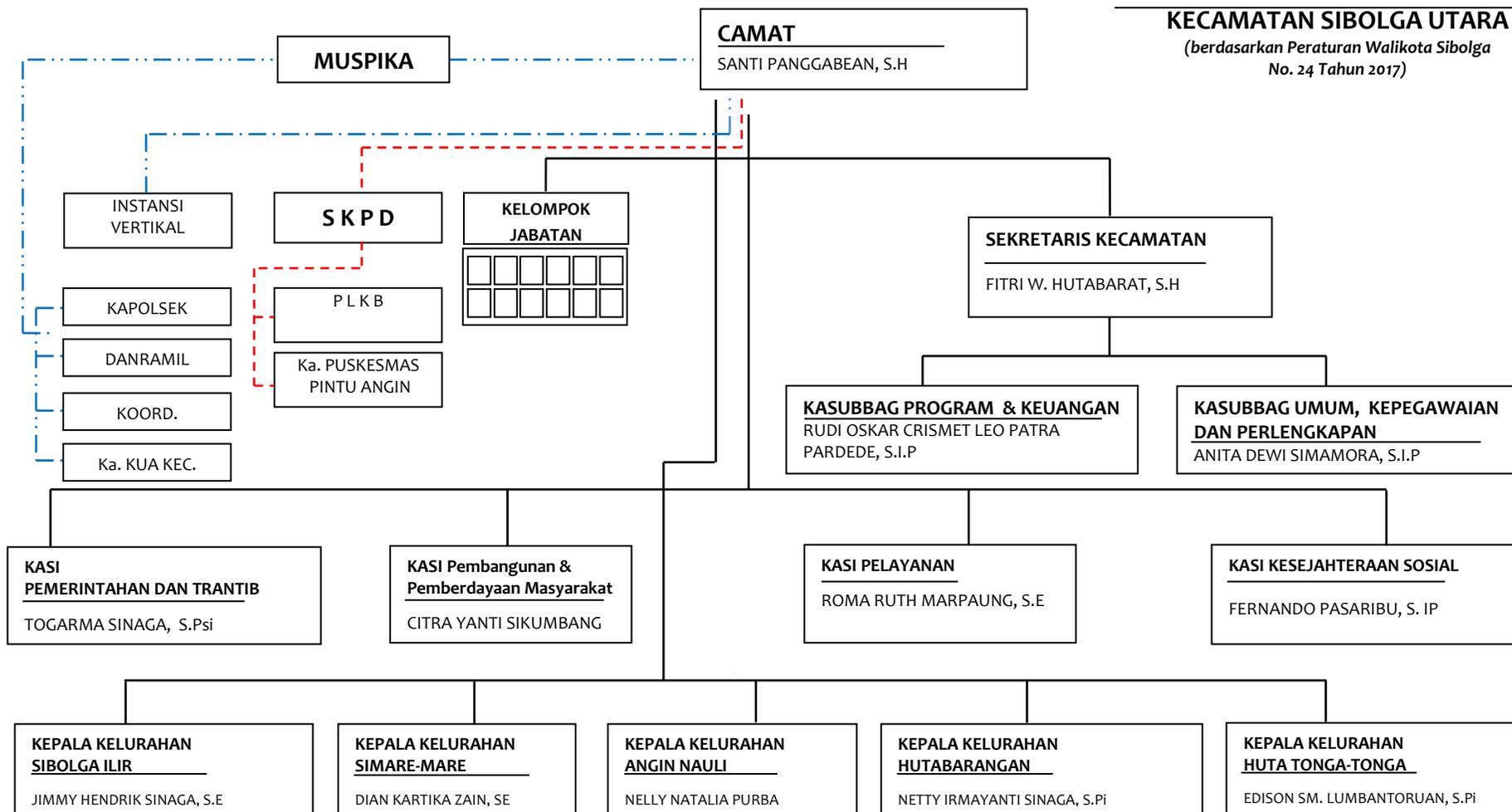
pelimpahan kewenangan ditetapkan oleh Walikota berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Umum.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah kota yang ada di Kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Secara skematis, struktur dan tata kerja perangkat organisasi dilingkungan Kecamatan Sibolga Utara sebagaimana digambarkan berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN SIBOLGA UTARA
 (berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga
 No. 24 Tahun 2017)



Garis Lini & Staf
 Garis Koordinasi Teknis
 Garis Koordinasi

1.2.3 Kondisi Eksisting Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan fungsi-fungsi pelayanan umum dan kemasyarakatan, di lingkungan organisasi Kecamatan Sibolga Utara telah ditempatkan sebanyak 105 orang aparatur sebagai asset intelektual. Jumlah ini terdiri dari 53 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 33 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dan 26 orang Kepala Lingkungan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.3.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara, Tenaga Harian Lepas dan Kepala Lingkungan di Jajaran Kecamatan Sibolga Utara
Keadaan : Desember 2024

NO	OPD	JUMLAH			JUMLAH
		PNS	THL	KEPLING	
1	Kelurahan Sibolga Ilir	7	5	6	18
2	Kelurahan Angin Nauli	7	3	6	16
3	Kelurahan Huta tonga-tonga	9	4	4	17
4	Kelurahan Simare-mare	7	5	6	18
5	Kelurahan Hutabaringan	6	3	4	13
6	Kecamatan Sibolga Utara	17	13	0	30
JUMLAH		53	33	26	112

Sumber : Kecamatan Sibolga Utara, 2024

Ditinjau dari jenis kelamin yang dimiliki, sebanyak 57 orang aparatur dilingkungan organisasi Kecamatan Sibolga Utara adalah laki-laki, sedangkan perempuan mengambil komposisi sebanyak 55 orang. Dari aspek latar pendidikan yang dimiliki, komposisi terbesar aparatur dilingkungan organisasi Kecamatan Sibolga Utara diisi oleh PNS, THL dan Kepala Lingkungan yang berpendidikan setingkat SLTA yakni sebesar 65,18% (73 orang), Sarjana Strata 1 sebesar 30,36% (34 orang), Diploma III sebesar 2,68% (3 orang), Pascasarjana (S2) sebesar 1,79% (2 orang), SMP dan SD nihil.

Berikut ini adalah gambaran sebaran PNS, THL, dan Kepling berdasarkan klasifikasinya :

Tabel 1.2
Bezetting PNS, THL, dan Kepling di Kecamatan Sibolga Utara
Keadaan : Desember 2024

KLASIFIKASI	PNS		THL	Kepling	JUMLAH	
	STRUKTURAL	FUNGSIONAL				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
E S E L O N	II/a	0	0	0	0	
	II/b	0	0	0	0	
	III/a	0	0	0	0	
	III/b	1	0	0	1	
	IV/a	10	0	0	10	
	IV/b	19	0	0	19	
	Jumlah	30	0	0	0	30
G O L O N G A N R U A N G	I/a	0	0	0	0	
	I/b	0	0	0	0	
	I/c	0	0	0	0	
	I/d	0	0	0	0	
	II/a	0	0	0	0	
	II/b	0	0	0	0	
	II/c	2	0	0	0	
	II/d	3	0	0	0	
	III/a	11	0	0	0	
	III/b	13	0	0	0	
	III/c	15	0	0	0	
	III/d	8	0	0	0	
	IV/a	1	0	0	0	
	IV/b	0	0	0	0	
Jumlah	53	0	0	0	0	
PENDIDIKAN FORMAL	SD	0	0	0	0	
	SMP	0	0	0	0	
	SMA	20	0	27	26	73
	D1	0	0	0	0	0
	D2	0	0	0	0	0
	D3	2	0	1	0	3
	S1	29	0	5	0	34
	S2	2	0	0	0	2
Jumlah	53	0	33	26	112	
KLASIFIKASI		PNS STRUKTURAL	THL FUNGSIONAL	Kepling	Jumlah	
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
PENDIDIKAN NONFORMAL	Diklat Pim II	0	0	0	0	
	Diklat Pim III	0	0	0	0	
	Diklat Pim IV	0	0	0	0	
	Jumlah	0	0	0	0	

Sumber : Kecamatan Sibolga Utara, 2024

1.2.4 Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja Kecamatan Sibolga Utara sehingga sangat dibutuhkan kondisi yang baik untuk mendukung kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2024 beberapa barang inventaris Kecamatan Sibolga Utara masih dalam kondisi baik dan beberapa yang sudah dalam kondisi rusak yang sangat dibutuhkan dalam membantu kinerja.

Kecamatan Sibolga Utara memiliki 16 (enam belas) komputer dengan kondisi layak pakai 8 (delapan) buah, 4 (empat) buah dalam kondisi rusak dan 4 (empat) buah dalam kondisi kurang layak pakai karena spesifikasi yang sudah menurun kinerjanya. Komputer tersebut sangat dibutuhkan untuk digunakan oleh bidang-bidang yang mobilitas kerjanya tidak hanya berada didalam kantor maupun diluar kantor, selain itu komputer-komputer tersebut dibutuhkan untuk menyimpan data sehingga dibutuhkan komputer yang memiliki kinerja baik untuk menghindari kehilangan maupun kerusakan data yang dimiliki bidang tersebut.

Kebutuhan lain Kecamatan Sibolga Utara adalah penambahan daya listrik, kipas angin 5 (lima buah), tiang bendera 6 (enam) buah, kanopi kantor, dan loket pelayanan di di Kelurahan Simaremare dan kantor Kecamatan Sibolga Utara yang telah selesai pembangunannya pada tahun 2020, kebutuhan lain adalah Air Conditioner (AC) sebanyak 6 (enam) buah yaitu 2 (dua) buah di Kelurahan Huta Barangan, 2 (dua) buah di Kelurahan Simaremare, 1

(satu) buah di Kelurahan Angin Nauli dan 1(satu) buah di Kantor Kecamatan Sibolga Utara.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sibolga Utara Tahun 2024 ini secara legal-administratif disusun berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kota Sibolga Nomor : 060/2610/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dan dari aspek legal-yuridis formal maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sibolga Utara Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu sepenuhnya kepada berbagai aturan hukum terkait, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. PERMENPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP;
5. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13);
6. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Sibolga yang didalamnya terdapat struktur organisasi Kecamatan Sibolga Utara;

1.4 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sibolga Utara ini menggunakan sistematika penulisan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini terdiri atas 4 Bab dengan dukungan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabulasi, dengan uraian umum masing-masing sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi yang melekat pada organisasi Kecamatan Sibolga Utara, Struktur dan Tata Kerja Organisasi, Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta uraian menyangkut sistematika penulisan dan penyajian laporan yang digunakan.

Sistematika penyajian uraian dalam bagian ini ditentukan sebagai berikut :

- A. Latar belakang;
- B. Gambaran Singkat Organisasi;
- C. Dasar Hukum;
- D. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan komponen perencanaan strategik yang dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan Perencanaan dan Penetapan Kinerja sebagaimana termaktub dalam perjanjian kinerja Pimpinan SKPD dengan Walikota Sibolga

Pada bagian ini diuraikan visi, misi, tujuan dan sasaran. Selain itu, dalam bagian ini juga diuraikan proses dan tahapan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rumusan kebijakan dan turunannya dalam bentuk program kerja yang

diuraikan dalam rincian rencana kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun pelaporan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Menyantumkan :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

2.1.1 Visi Dan Misi

a. *V i s i*

Visi Pemerintahan Kota Sibolga adalah :

“MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR“

b. *M i s i*

Misi Pemerintah Kota Sibolga adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel.
2. Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan sehingga melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur.
3. Mewujudkan Pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (*smart city*).
4. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi keperguruan tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan guru.
5. Misi Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi

dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di kota sibolga maupun di luar kota sibolga

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1 : Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses dan tahapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan dan kelurahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>1</i>	<i>2</i>
S.1 Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1. Jumlah Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan

Tujuan 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima yang lebih berkualitas, efisien dan efektif di kecamatan dan kelurahan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>1</i>	<i>2</i>
S.2 A. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1. Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran 2. Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan
B. Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	1. Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu
C. Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	1. Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban keuangan tepat waktu

Tujuan 3 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang berwibawa, profesional dan amanah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>1</i>	<i>2</i>
S.3 Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan
	2. Jumlah Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Pelatihan

Tujuan 4 : Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang memiliki nilai kebudayaan, keagamaan dan peduli terhadap lingkungan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<i>1</i>	<i>2</i>
S.4 Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat
	2. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pengelolaan Keragaman Budaya
	3. Jumlah Pembinaan, Pemasyarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Kecamatan Sibolga Utara merupakan sebuah dokumen penetapan kinerja yang pada dasarnya memuat pernyataan kesanggupan dari Camat selaku pimpinan organisasi Kecamatan yang dalam tatanan organisasi Pemerintah Kota Sibolga merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, kepada Walikota Sibolga sebagai atasan langsungnya untuk mewujudkan target-target kinerja tertentu. Hal ini merupakan pengimplementasian dari ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang

menyatakan bahwa dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dokumen perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Camat Sibolga Utara dan Walikota Sibolga, dilampiri dengan dokumen penetapan kinerja. Penetapan kinerja ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Camat Sibolga Utara yang telah menerima amanah/tanggungjawab dengan Walikota Sibolga yang telah memberikan amanah/tanggungjawab. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SIBOLGA UTARA
TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
S.1	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1. Meningkatnya Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	1 persen
		2. Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	1 persen
S.2	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 persen
S.3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	A
S.4	Terjaganya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	1 persen
		2. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	1 persen
		3. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat, Pemasarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	1 persen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Sibolga Utara dimulai dengan mengembangkan indikator kinerja yang berpedoman pada Renstra tahun 2021 – 2026. Pengukuran kinerja ini dibuat dengan penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja yang dikaitkan dengan capaian sasaran.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi, dimana hasil pengukuran tersebut lebih lanjut dapat mengidentifikasi faktor permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun berikutnya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Sibolga Utara Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja dengan capaian kinerja nyata (realisasi), membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, dan membandingkan antara realisasi Tahun 2024 dengan target Renstra Kecamatan Sibolga Utara Tahun 2021-2026.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut, kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait. Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan mempergunakan skala pengukuran ordinal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2010, sebagai berikut :

Nilai Angka	Kategori
>85 s/d 100	Memuaskan
>75 s/d 85	Sangat Baik
>65 s/d 75	Baik
>50 s/d 65	Cukup Baik
>30 s/d 50	Agak Kurang
0 s/d 30	Kurang

Adapun Capaian indikator kinerja Kecamatan Sibolga Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
RENCANA DAN REALISASI CAPAIAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PELAYANAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH
KECAMATAN SIBOLGA UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024			Target Renstra	Capaian s/d 2024
					Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1. Meningkatnya Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	1 persen	1 persen	1 persen	1 persen	100	5 persen	3 persen
		2. Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	1 persen	1 persen	1 persen	1 persen	100	5 persen	3 persen
2.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	100	80 persen	80 persen
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	B	BB	A	BB	78,91	A	78,91
4.	Terjaganya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	1 persen	0 persen	1 persen	0 persen	0	5 persen	1 persen
		2. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	0 persen	0 persen	1 persen	0 persen	0	5 persen	0 persen
		3. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat, Pemasarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	1 persen	1 persen	1 persen	1 persen	100	5 persen	3 persen

Tabel 3.2
PENCAPAIAN KINERJA ESELON III
PADA KANTOR CAMAT SIBOLGA UTARA
TAHUN 2024

No.	Bagian / Bidang	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	CAMAT	Meningkatnya Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	1 persen	1 persen	100
		Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	1 persen	1 persen	100
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 persen	80 persen	100
		Nilai SAKIP Kecamatan	A	BB	78,91
		Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	1 persen	0 persen	0
		Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	1 persen	0 persen	0
		Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat, Pemasyarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	1 persen	1 persen	100
Rata-rata Capaian Kinerja					68,42

TABEL 3.3
PENCAPAIAN KINERJA ESELON IV
PADA KANTOR CAMAT SIBOLGA UTARA
TAHUN 2024

No.	Bagian / Bidang	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Sekretaris	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	100
		Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	100 persen	100 persen	100
		Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100 persen	100 persen	100
		Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	100 persen	100 persen	100
		Jumlah Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Pelatihan	15 orang	0 orang	0
Rata-rata Capaian Kinerja					80
2.	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	6 kali	6 kali	100
		Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pengelolaan Keragaman Budaya	250 Orang	0 Orang	0
		Jumlah Pembinaan, Pemasyarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	2 kali	2 kali	100
Rata-rata Capaian Kinerja					66,67
3.	Seksi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	3 kali	0 kali	0
		Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pengelolaan Keragaman Budaya	250 Orang	0 Orang	0
Rata-rata Capaian Kinerja					0
4.	Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	100 persen	100 persen	100
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan	100 persen	100 persen	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100
5.	Seksi Pelayanan	Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	100 persen	100 persen	100
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan	100 persen	100 persen	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100

No.	Bagian / Bidang	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
6.	Lurah	Jumlah Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	6 kali	6 kali	100
		Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	100
		Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	100 persen	100 persen	100
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan	100 persen	100 persen	100
		Jumlah Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Pelatihan	15 orang	0 orang	0
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	3 kali	0 kali	0
		Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pengelolaan Keragaman Budaya	250 Orang	0 Orang	0
		Jumlah Pembinaan, Pemasarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	2 kali	2 kali	100
Rata-rata Capaian Kinerja					62,50
7.	Kasubbag Program dan Keuangan	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100 persen	100 persen	100
		Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	100 persen	100 persen	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100
8.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	100
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan	100 persen	100 persen	100
		Jumlah Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Pelatihan	15 orang	0 orang	0
Rata-rata Capaian Kinerja					66,67

Secara umum, Kecamatan Sibolga Utara melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dalam hal ini, Kecamatan Sibolga Utara melaksanakan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Secara umum, semua Program dan Kegiatan yang telah direncanakan oleh Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga pada Tahun 2024 dapat dilaksanakan meskipun tidak maksimal tetapi tetap dalam koridor Tujuan serta Sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

a. **Misi 1 :**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel

Tujuan 1 :

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses dan tahapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan dan kelurahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
S.1.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1. Meningkatnya Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	1 persen	1 persen	100
		2. Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	1 persen	1 persen	100
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja S.1					100

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian indikator kinerja pada sasaran pertama (S.1) adalah **100%**, termasuk dalam kategori **Memuaskan**. Kondisi tersebut merupakan gambaran tingginya keterlibatan dan peran aktif masyarakat di lingkungan Kecamatan Sibolga Utara dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

b. **Misi 1 :**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel

Tujuan 2 :

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima yang lebih berkualitas, efisien dan efektif di kecamatan dan kelurahan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
S.2.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 persen	80 persen	100
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja S.2					100

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian indikator kinerja pada sasaran kedua (S.2) adalah **100%**, masuk dalam kategori **Memuaskan**. Keberhasilan pencapaian sasaran kedua ini didukung oleh kerjasama yang baik dan efektif oleh seluruh komponen aparatur Kecamatan Sibolga

c. **Misi 1 :**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel

Tujuan 3 :

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang berwibawa, profesional dan amanah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
S.3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	A	BB	78,91
Capaian Indikator Kinerja S.3					78,91

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran ketiga adalah **BB**, yang kemudian di konversi menjadi 78,91 persen, masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Meskipun pencapaian sasaran ketiga tersebut tidak mendapatkan nilai sempurna seperti yang di targetkan bukan berarti kegagalan dalam pencapaian kinerja, hasil tersebut sangat realitas mengingat nilai sempurna adalah hal yang sangat sulit dicapai namun perolehan tersebut merupakan motivasi untuk mencapai nilai lebih baik di kemudian hari.

d. **Misi 1 :**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel

Tujuan 4 :

Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang memiliki nilai kebudayaan, keagamaan dan peduli terhadap lingkungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
S.4.	Terjaganya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	1 persen	0 persen	0
		2. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	1 persen	0 persen	0
		3. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat, Pemasarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	1 persen	1 persen	100
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja S.4					33,33

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata persentase capaian indikator kinerja pada sasaran keempat (S.4) adalah 33,33%, termasuk dalam kategori **Cukup Baik**. Meskipun kondisinya termasuk dalam kategori Agak Kurang bukan berarti kinerja Sasaran Strategis 4 dapat dikategorikan gagal dalam pelaksanaannya karena program dan kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat dalam penyelenggaraannya sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sibolga sehingga Kecamatan Sibolga Utara hanya berperan dalam mengirimkan kontingen untuk mengikuti kegiatan tersebut. Pada tahun 2024 kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Natal Oikumene dan kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) tidak dilaksanakan begitu juga dengan kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sibolga sehingga tidak ada kontingen yang dikirimkan oleh Kecamatan Sibolga Utara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

Dari penjelasan di atas, adapun nilai capaian berdasarkan hasil analisis dan evaluasi sasaran kinerja Kecamatan Sibolga Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Dari perhitungan tersebut dengan menggunakan matrik skala pengukuran di atas, nilai akumulasi rata-rata capaian kegiatan tercapai sebesar **78,06%**. Dengan demikian, secara kualitatif berdasarkan kriteria penilaian dengan menggunakan skala ordinal sebagaimana ditunjukkan dalam matriks di atas, pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

No.	Sasaran	Skala Pengukuran						Ket.
		M	SB	B	CB	AK	K	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	100%	-	-	-	-	-	-
2.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	100%	-	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	-	78,91%	-	-	-	-	-
4.	Terjaganya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	-	-	-	-	33,33%	-	-

Keterangan :

M	=	Memuaskan	CB	=	Cukup Baik
SB	=	Sangat Baik	AK	=	Agak Kurang
B	=	Baik	K	=	Kurang

Tabel 3.1.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
1.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1. Meningkatnya Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	1 persen	1 persen	100	Laporan RKPD Tahun 2024
		2. Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	1 persen	1 persen	100	Laporan RKPD Tahun 2024
2.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 persen	80 persen	100	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	A	BB	78,91	Laporan RKPD Tahun 2024
4.	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	1 persen	0 persen	0	Laporan RKPD Tahun 2024
		2. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	1 persen	0 persen	0	Laporan RKPD Tahun 2024
		3. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat, Pemasarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	1 persen	1 persen	100	Laporan RKPD Tahun 2024

3.1.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023, dan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022 Realisasi	Tahun 2023 Realisasi	Tahun 2024		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1. Meningkatnya Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	1 persen	1 persen	1 persen	1 persen	100
		2. Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	1 persen	1 persen	1 persen	1 persen	100
2.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 persen	80 persen	80 persen	80 persen	100
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	B	B	A	BB	78,91
4.	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	1 persen	0 persen	1 persen	0 persen	0
		2. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	0 persen	0 persen	1 persen	0 persen	0
		3. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat, Pemasarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	1 persen	1 persen	1 persen	1 persen	100

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1. Meningkatnya Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	1 persen	5 persen	20%
		2. Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	1 persen	5 persen	20%
2.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 persen	100 persen	80%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	BB	A	78,91
4.	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	0 persen	5 persen	0%
		2. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	0 persen	5 persen	0%
		3. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat, Pemasarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	1 persen	5 persen	20%

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional / Provinsi

Ralisasi kinerja Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tidak bisa dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada acuan yang dapat dijadikan sebagai pembandingan.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor yang mendukung secara umum keberhasilan realisasi kinerja Kecamatan Sibolga Utara Tahun 2024 antara lain:

1. Dukungan dari unsur pimpinan Kota Sibolga beserta jajarannya serta dukungan aktif dari seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sibolga Utara dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sibolga Utara.

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional / Provinsi	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1. Meningkatnya Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	1 persen	N	
		2. Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	1 persen		
2.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 persen	I	
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	BB		
4.	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	0 persen	H I L	
		2. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	0 persen		
		3. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat, Pemasarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	1 persen		

2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang konsisten di setiap bidang dalam struktur organisasi Kecamatan Sibolga Utara.
3. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik diantara masing-masing unit/bidang organisasi.
4. Program kerja berpedoman pada tupoksi yang jelas dan pelaksanaan SOP secara konsiten oleh setiap aparatur serta integritas yang tinggi terhadap setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sibolga Utara

Selain faktor pendukung, terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala dalam mendukung pengimplementasian program dan kegiatan Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga pada Tahun Anggaran 2024. Faktor yang sangat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sibolga Utara pada tahun 2024 adalah *refocusing* anggaran yang berdampak langsung terhadap hal-hal berikut ini :

1. Program dan Kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak adanya anggaran yang diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Sibolga Utara
2. Pencapaian target kinerja yang tidak maksimal karena tidak dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sehingga menurunkan persentasi pencapaian target yang telah ditentukan.

Tabel 3.1.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1. Meningkatkan Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan 2. Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	1 persen	1 persen	100	Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan berupa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kegiatan Musrenbang terlaksana secara konsisten karena tingginya kesadaran masyarakat akan kontribusinya dalam pembangunan daerah	
2.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 persen	80 persen	100	Pelaksanaan Pelayanan Publik dapat berlangsung dengan baik bukan hanya karena dukungan pendanaan yang memadai namun juga karena konsistensi dan komitmen kuat yang dimiliki aparatur dalam memberikan pelayanan terbaik	
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	A	BB	78,91	Tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten untuk meningkatkan kinerja aparatur Kelurahan dan kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan tupoksi masing-masing aparatur	Kecamatan dan Kelurahan selalu melakukan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada seluruh komponen aparatur dan tata kelola dalam menjalankan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
4.	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1. Meningkatkan Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat 2. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya 3. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat, Pemasarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	1 persen	0 persen	0	Kegiatan keagamaan bukan lagi menjadi kewenangan Kecamatan dalam pelaksanaannya, Kecamatan hanya sebatas mengirimkan delegasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sibolga	Kecamatan dan Kelurahan memberikan kontribusi penuh dalam mengirimkan delegasi terbaiknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Sibolga
			1 persen	0 persen	0	Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sibolga dalam pelaksanaannya, Kecamatan memberikan kontribusinya dengan mengirimkan delegasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sibolga	Kecamatan dan Kelurahan memberikan kontribusi penuh dalam mengirimkan delegasi terbaiknya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya yang diselenggarakan Pemerintah Kota Sibolga
			1 persen	1 persen	100	Kecamatan dan Kelurahan memberi perhatian penuh dalam memasyarakatkan olahraga dan membangun pola hidup sehat dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan tentunya hal tersebut didukung oleh pendanaan yang konsisten dari Pemerintah Kota Sibolga	

Dari uraian diatas beberapa hal yang perlu disarankan sebagai solusi dalam rangka pencapaian keberhasilan/kesuksesan visi dan misi Pembangunan Kota Sibolga dimasa yang akan datang kepada pihak atasan adalah perlunya tetap mempertahankan dan menyelenggarakan program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya sangat mempengaruhi kinerja aparatur di Kantor Kecamatan dan Kelurahan di Sibolga Utara, dengan kondisi anggaran yang cukup minim bukan berarti kinerja ikut menjadi minim namun tetap dapat dilaksanakan secara maksimal meskipun minimnya anggaran berpengaruh besar terhadap frekuensi yang jauh berkurang baik itu kegiatan maupun kapasitas aparatur.

Pada dasarnya tidak ada efisiensi yang dilakukan akibat kurang mumpuninya anggaran namun lebih tepatnya adalah pengurangan frekuensi dengan tujuan agar dukungan sumber daya yang diberikan tetap diupayakan agar kinerja tetap berjalan. Walaupun demikian, dengan keterbatasan tersebut Kecamatan Sibolga Utara masih bisa melaksanakan program dan kegiatan secara optimal meskipun kemudian terjadi tumpang tindih tupoksi sehingga target dan realisasi kegiatan bisa tercapai.

Kondisi analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan dan Kelurahan di Sibolga digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1. Meningkatnya Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan	1 persen	1 persen	100	1.000.000.000	723.506.123	72,35%	Pada dasarnya tidak ada efisiensi yang dilakukan karena masih kurangnya anggaran yang berdampak pada pengurangan peserta dari masyarakat agar anggaran dapat mencukupi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
		2. Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	1 persen	1 persen	100	29.999.804	29.267.100	97,56%	
2.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 persen	80 persen	100	1.486.966.831	1.437.783.920	96,69%	Pada dasarnya tidak ada efisiensi yang dilakukan karena masih kurangnya anggaran yang berdampak pada pengurangan berbagai kebutuhan peralatan dan perawatan agar anggaran dapat mencukupi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	A	BB	78,91	20.146.408	19.705.000	97,81%	Pada dasarnya tidak ada efisiensi yang dilakukan karena masih kurangnya anggaran yang berdampak pada pengurangan frekuensi kegiatan Pembinaan Kelurahan
4.	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	1 persen	0 persen	0	-	-	0%	Pada dasarnya tidak ada efisiensi yang dilakukan karena masih kurangnya anggaran yang berdampak pada pengurangan frekuensi kegiatan Pembinaan, Pemasyarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat
		2. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	1 persen	0 persen	0	-	-	0%	
		3. Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat, Pemasyarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	1 persen	1 persen	100	16.906.245	16.799.100	99,37%	

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Dari capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, terdapat 4 Program, 8 Kegiatan, dan 19 sub kegiatan pembangunan untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2024 di Kecamatan Sibolga Utara. Program dan Kegiatan yang mendukung Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.7

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1. Meningkatkan Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	1			1	Menunjang	Program ini sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan di wilayah Kelurahan, berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diselenggarakan oleh Kelurahan yang ditunjang juga dengan pengadaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat di lingkungan Kelurahan. Namun pada salah satu kegiatan yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dukungan pendanaannya terpisah di Kecamatan sangat timpang sehingga dalam penyelenggaraannya tidak maksimal
			100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90		
				1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100		
			2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	80			
		2. Meningkatkan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	1			1		
			100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100		
	1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100				
2.	A. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80			80	Menunjang	Program ini merupakan program yang mendukung rutinitas dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan dan Kelurahan, dari sisi kinerja program ini tetap berjalan dengan baik, namun dari segi dukungan anggaran program ini bisa dikatakan sangat minim sehingga berdampak kepada berbagai kegiatan rutin karena terjadi penurunan perlakuan terhadap inventaris dan juga aktivitas aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
			100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
				1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100		
				2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	100		
				3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		
				4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100		
			100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	Menunjang	
				1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan	100		
			100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang	
				1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang / Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai SAKIP Kecamatan	A			BB	Menunjang	Program ini merupakan program yang berperan besar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang melibatkan Kelurahan dan Kepala Lingkungan, dari sisi kinerja program ini tetap berjalan dengan baik, namun dari segi dukungan anggaran program ini bisa dikatakan sangat minim sehingga berdampak kepada berbagai kegiatan pelayanan terutama pelayanan yang dilaksanakan oleh Kepala Lingkungan yang tidak maksimal
			100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	BB		
				1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100		
			100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100		
	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan upaya peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	0					
4.	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1. Meningkatkan Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	Menunjang	Program ini merupakan program yang berperan besar dalam membangun hubungan dan kedekatan antara Kecamatan dan Kelurahan dengan masyarakat di bidang keagamaan, namun program ini tidak mendapat dukungan anggaran, selain itu Kecamatan dan Kelurahan hanya berperan mengirimkan delegasi apabila kegiatan keagamaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sibolga
				1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna meningkatkan peran masyarakat dalam Pembangunan	0		
		2. Meningkatkan Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	Menunjang	Program ini merupakan program yang berperan besar dalam mengembangkan kreativitas dan budaya daerah yang melibatkan masyarakat secara langsung, namun program ini tidak mendapat dukungan anggaran selain itu Kecamatan dan Kelurahan hanya berperan mengirimkan delegasi apabila kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sibolga
				1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna meningkatkan peran masyarakat dalam Pembangunan	0		
		3. Meningkatkan Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat, Pemasarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	Menunjang	Program ini merupakan program yang berperan besar dalam membangun hubungan dan kedekatan antara Kecamatan dan Kelurahan dengan masyarakat dalam menjaga lingkungan, kesehatan, dan kerukunan, dari sisi kinerja program ini tetap berjalan dengan baik, namun dari segi dukungan anggaran program ini bisa dikatakan sangat minim sehingga berdampak kepada penurunan frekuensi kebersamaan dan kedekatan masyarakat dengan Kecamatan dan Kelurahan
				1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi guna meningkatkan peran masyarakat dalam Pembangunan	100		

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Kecamatan Sibolga Utara didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 7.622.125.600,-** dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **Rp. 6.409.430.099,-** atau sebesar **84,09%** dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan penyerapan anggaran sebesar **82,74%** atau sebesar **Rp. 4.104.965.056,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 4.961.395.872,-**. Belanja Pegawai di Kecamatan Sibolga Utara terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan dengan penyerapan anggaran sebesar **80,15%** atau sebesar **Rp. 2.388.611.232,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 2.980.103.800,-** dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS dengan penyerapan anggaran sebesar **69,46%** atau sebesar **Rp. 577.018.924,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 830.760.140,-**

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa di Kecamatan Sibolga Utara terealisasi dengan penyerapan anggaran sebesar **89,05%** atau sebesar **Rp. 1.972.806.428,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 2.215.425.328,-**.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Organisasi Pemerintah Kota Sibolga pada Tahun 2024 telah mampu mengimplementasikan 4 Program, 8 kegiatan, dan 19 sub kegiatan berbagai Program dan kegiatan yang telah direncanakan dari sisi pendanaan dengan klasifikasi **Sangat Baik**. Hal ini dicerminkan dari indeks kemampuan penyerapan anggaran yang tercapai sebesar **84,09%** atau sebesar **Rp. 6.409.430.099,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 7.622.125.600,-**

TABEL 3.2.1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN SIBOLGA UTARA
TAHUN 2024

KODE	Program / Kegiatan	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
5	Belanja	7.622.125.600	6.409.430.099	1.212.695.502	
5.1	Belanja Operasi	7.622.125.600	6.409.430.099	1.212.695.502	
5.1.01	a. Belanja Pegawai	4.961.395.872	4.104.965.056	856.430.816	
5.1.02	b. Belanja Barang dan Jasa	2.215.425.328	1.972.806.428	242.618.901	
5.2	Belanja Modal	445.304.400	331.658.615	113.645.785	
07	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN	7.622.125.600	6.409.430.099	1.212.695.502	
07.01	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN)	7.622.125.600	6.409.430.099	1.212.695.502	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.448.362.703	5.542.748.976	905.613.727	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.961.395.872	4.104.965.056	856.430.816	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.961.395.872	4.104.965.056	856.430.816	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.326.199	166.705.800	14.620.399	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	20.843.800	20.836.300	7.500	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.499.200	32.498.700	500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.995.999	49.143.500	2.852.499	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.999.700	21.998.300	1.400	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	6.380.500	6.379.000	1.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.607.000	35.850.000	11.757.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.209.235.200	1.182.054.151	27.181.049	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	3.900.000	-	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.920.200	70.259.651	24.660.549	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.015.000	62.494.500	-	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.045.400.000	1.045.400.000	-	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.405.432	89.023.969	7.381.463	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.234.850	52.363.969	2.870.881	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.860.000	21.860.000	-	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.310.582	14.800.000	4.510.582	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	123.763.093	97.885.900	25.877.193	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	86.710.440	61.381.800	25.328.640	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50.000.000	34.196.200	15.803.800	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.710.440	27.185.600	9.524.840	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.146.408	19.705.000	441.408	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.146.408	19.705.000	441.408	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16.906.245	16.799.100	107.145	
7.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16.906.245	16.799.100	107.145	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.029.999.804	752.773.223	277.226.582	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	29.999.804	29.267.100	732.704	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.999.804	29.267.100	732.704	
7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN ANGIN NAULI	200.000.000	130.090.736	69.909.264	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.300	40.138.390	69.861.910	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.300	40.138.390	69.861.910	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	89.999.700	89.952.346	47.354	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	89.999.700	89.952.346	47.354	
7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN HUTA TONGA-TONGA	200.000.000	40.138.090	159.861.910	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.000	40.138.090	69.861.910	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.000	40.138.090	69.861.910	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	90.000.000	-	90.000.000	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000	-	90.000.000	
7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN HUTA BARANGAN	200.000.000	199.933.464	66.537	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.300	109.981.117	19.183	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.300	109.981.117	19.183	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	89.999.700	89.952.347	47.354	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	89.999.700	89.952.347	47.354	
7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN SIBOLGA ILIR	200.000.000	153.368.577	46.631.423	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.000	63.374.138	46.625.862	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.000	63.374.138	46.625.862	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	90.000.000	89.994.439	5.561	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000	89.994.439	5.561	
7.01.0.00.0.00.01.0005	KELURAHAN SIMAREMARE	200.000.000	199.975.256	24.744	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.000	109.980.817	19.183	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.000	109.980.817	19.183	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	90.000.000	89.994.439	5.561	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000	89.994.439	5.561	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	16.022.000	3.978.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	16.022.000	3.978.000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	16.022.000	3.978.000	

TABEL 3.2.2
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN SIBOLGA UTARA
TAHUN 2024

KODE	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja
1	2	3	4
07	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN		
07.01	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN)	100 persen	97,92 persen
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 persen	100 persen
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	630 orang	630 orang
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	6 paket	6 paket
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 paket	6 paket
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 paket	6 paket
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 paket	6 paket
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	12 dokumen	12 dokumen
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 persen	100 persen
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13 unit	13 unit
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 unit	17 unit
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 unit	20 unit
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 persen	100 persen
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	100 persen	100 persen
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	12 laporan
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 laporan	12 laporan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 persen	100 persen
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 persen	100 persen
7.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	12 laporan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 persen	91,67 persen
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	100 persen
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan
7.01.0.00.0.00.01.0001	KELURAHAN ANGIN NAULI	100 persen	100 persen
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	100 persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas /	10 Pokmas /
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	25 Unit	25 Unit
7.01.0.00.0.00.01.0003	KELURAHAN HUTA TONGA-TONGA	100 persen	50 persen
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	100 persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas /Ormas	10 Pokmas /Ormas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen	0 persen
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	25 Unit	0 Unit
7.01.0.00.0.00.01.0002	KELURAHAN HUTA BARANGAN	100 persen	100 persen
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	100 persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas /Ormas	10 Pokmas /Ormas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	25 Unit	25 Unit
7.01.0.00.0.00.01.0004	KELURAHAN SIBOLGA ILIR	100 persen	100 persen
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	100 persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas /Ormas	10 Pokmas /Ormas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	25 Unit	25 Unit
7.01.0.00.0.00.01.0005	KELURAHAN SIBOLGA UTARA	100 persen	100 persen
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 persen	100 persen
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas /Ormas	10 Pokmas /Ormas
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	25 Unit	25 Unit
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 persen	100 persen
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen	100 persen
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan

TABEL 3.2.3
PERBANDINGAN REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 DAN 2024
KECAMATAN SIBOLGA UTARA
TAHUN 2024

KODE	Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4		5	6
07	URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN	7.622.125.600	6.409.430.099	84,09	6.701.974.633	93,20
07.01	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (KECAMATAN)	7.622.125.600	6.409.430.099	84,09	6.701.974.633	93,20
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.448.362.703	5.542.748.976	85,96	5.400.307.369	92,67
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.961.395.872	4.104.965.056	82,74	3.750.436.165	90,51
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.961.395.872	4.104.965.056	82,74	3.750.436.165	90,51
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.326.199	166.705.800	91,94	416.968.950	99,27
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	20.843.800	20.836.300	99,96	35.122.200	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				142.525.200	99,80
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.499.200	32.498.700	99,998	57.672.100	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.995.999	49.143.500	94,51	48.849.450	96,93
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.999.700	21.998.300	99,99	36.960.000	100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	6.380.500	6.379.000	99,98	12.480.000	99,84
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.607.000	35.850.000	75,30	83.360.000	98,57
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.209.235.200	1.182.054.151	97,75	1.120.466.854	97,61
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	3.900.000	100	3.990.000	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.920.200	70.259.651	74,02	71.226.854	75,04
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.015.000	62.494.500	96,12	-	-
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.045.400.000	1.045.400.000	100	1.045.250.000	99,64
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.405.432	89.023.969	92,34	112.435.400	96,92
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.234.850	52.363.969	94,80	80.585.400	95,75
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.860.000	21.860.000	100	31.850.000	100
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.310.582	14.800.000	76,64		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	123.763.093	97.885.900	79,09	62.010.800	97,18
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	86.710.440	61.381.800	70,79		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50.000.000	34.196.200	68,39		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.710.440	27.185.600	74,05		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.146.408	19.705.000	97,81	-	-
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.146.408	19.705.000	97,81		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16.906.245	16.799.100	99,37	62.010.800	97,18
7.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16.906.245	16.799.100	99,37	62.010.800	97,18
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.029.999.804	752.773.223	73,08%	1.239.656.464	95,36
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	29.999.804	29.267.100	97,56		
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.999.804	29.267.100	97,56		
01.00	KELURAHAN ANGIN NAULI	200.000.000	130.090.736	65,05	247.455.166	95,18
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.300	40.138.390	36,49	59.443.700	99,07
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.300	40.138.390	36,49	59.443.700	99,07
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	89.999.700	89.952.346	99,95	41.302.300	80,84
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	89.999.700	89.952.346	99,95	41.302.300	80,84
7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim				146.709.166	98,52
7.01.03.7.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim				146.709.166	98,52
01.00	KELURAHAN HUTA TONGA-TONGA	200.000.000	40.138.090	20,07	244.103.919	93,89
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.000	40.138.090	36,49	59.574.800	99,29
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.000	40.138.090	36,49	59.574.800	99,29
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	90.000.000	-	0,00	27.418.975	67,41
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000	-	0,00	27.418.975	67,41
7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim				157.110.144	98,61
7.01.03.7.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim				157.110.144	98,61

KODE	Program / Kegiatan	Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024		Realisasi Tahun 2023	
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3	4		5	
01.00	KELURAHAN HUTA BARANGAN	200.000.000	199.933.464	99,97	240.852.516	92,64
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.300	109.981.117	99,98	59.481.800	99,14
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.300	109.981.117	99,98	59.481.800	99,14
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	89.999.700	89.952.347	99,95	26.999.950	62,08
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	89.999.700	89.952.347	99,95	26.999.950	62,08
7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim				154.370.766	98,63
7.01.03.7.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim				154.370.766	98,63
01.00	KELURAHAN SIBOLGA ILIR	200.000.000	153.368.577	76,68	256.962.265	98,83
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.000	63.374.138	57,61	59.574.800	99,29
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.000	63.374.138	57,61	59.574.800	99,29
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	90.000.000	89.994.439	99,99	30.359.950	98,88
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000	89.994.439	99,99	30.359.950	98,88
7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim				167.027.515	98,66
7.01.03.7.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim				167.027.515	98,66
01.00	KELURAHAN SIMAREMARE	200.000.000	199.975.256	99,99	250.282.598	96,26
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.000	109.980.817	99,98	59.479.200	99,13
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.000	109.980.817	99,98	59.479.200	99,13
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	90.000.000	89.994.439	99,99	25.026.925	78,58
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000	89.994.439	99,99	25.026.925	78,58
7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim				165.776.473	98,59
7.01.03.7.04.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim				165.776.473	98,59
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	16.022.000	80,11		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	16.022.000	80,11		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	20.000.000	16.022.000	80,11		

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Berdasarkan indikator pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan yang terjadi di Kecamatan Sibolga Utara pada Tahun 2024 mencapai **76,39%** dengan kategori **Sangat Baik**. Dari segi akuntabilitas keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan, Kecamatan Sibolga Utara didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 7.622.125.600,-** dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar **Rp. 6.409.430.099,-** yaitu sebesar **84,09%**.

Adapun Program dan Kegiatan pada Tahun 2024 yang terdapat di Kecamatan Sibolga Utara terdiri dari 4 Program, 8 kegiatan, dan 19 sub kegiatan telah terealisasi dengan baik dengan kemampuan penyerapan anggaran dari Belanja Barang dan Jasa yang tercapai sebesar **89,05%** atau sebesar **Rp 1.972.806.428,-** dari total anggaran sebesar **Rp 2.215.425.328,-**. Dari uraian di atas, walaupun pencapaian Kecamatan Sibolga Utara Tahun 2024 masuk dalam kategori **Sangat Baik** dan dapat dikatakan berhasil, akan tetapi dalam hal ini untuk tinjauan kedepan atas perubahan-perubahan pelaksanaan, sangat diperlukan sistem pelaksanaan yang benar-benar dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerja. Dalam hal ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran sebagai suatu bentuk pemenuhan penilaian organisasi untuk kemajuan dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan.

B. Tinjauan Khusus

Kecamatan Sibolga Utara merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerah yang secara umum langsung berhubungan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dipimpin oleh seorang Camat dengan tingkat Eselon III/a yang mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditetapkan secara terperinci.

Kecamatan Sibolga Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah pendukung pelaksana kegiatan Program Pemerintah Kota Sibolga yang tertuang dalam Visi dan Misi serta rangkaian kegiatan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kota Sibolga.

Beberapa kendala dan tantangan yang masih memerlukan perbaikan di masa yang akan datang merupakan realisasi program (Renstra) didalam kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dengan alokasi dana yang benar-benar dapat direalisasikan dalam setiap penyusunan program kerja (kegiatan).

Disamping itu sumber daya manusia yang kredible masih merupakan kebutuhan yang perlu dibenahi dalam mendukung unsur pelaksana keberhasilan setiap program, sehingga Visi dan Misi Kota Sibolga dapat terwujud dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga Tahun 2024 ini dibuat untuk dapat dijadikan evaluasi kinerja dimasa yang akan datang demi kemajuan dan efektifitas, produktifitas serta peningkatan kualitas kerja khususnya dalam bidang pelayanan masyarakat, dengan harapan seluruh pihak umumnya, dan pimpinan khususnya dapat melihat dan sekaligus mengevaluasi/capaian kinerja Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga. Kritikan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan, demi perbaikan capaian kinerja Kecamatan Sibolga Utara dimasa yang akan datang.

Sibolga, 11 Januari 2025

CAMAT SIBOLGA UTARA

SANTI PANGGABEAN, S.H
PENATA TK I

NIP. 19810221 200903 2 006

LAMPIRAN

CASCADING PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SIBOLGA UTARA

VISI KECAMATAN SIBOLGA UTARA, KOTA SIBOLGA

MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT PINTAR DAN MAKMUR

MISI 1

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel

TUJUAN

1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses dan tahapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan dan kelurahan
2. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima yang lebih berkualitas, efisien dan efektif di kecamatan dan kelurahan
3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang berwibawa, profesional dan amanah
4. Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang memiliki nilai kebudayaan, keagamaan dan peduli terhadap lingkungan

INDIKATOR TUJUAN

1. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses dan Tahapan Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kecamatan dan Kelurahan
2. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Prima yang Lebih Berkualitas, Efisien dan Efektif di Kecamatan dan Kelurahan
3. Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran
4. Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan

5. Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu
6. Persentase Penyampaian Pertanggung jawaban keuangan tepat waktu
7. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang Berwibawa, Profesional dan Amanah
8. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan
9. Persentase Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Memiliki Nilai Kebudayaan, Keagamaan dan Peduli Terhadap Lingkungan

SASARAN

1. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan dan kelurahan.
2. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan
3. Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu
4. Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu
5. Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
6. Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat

STRATEGI

1. Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Melibatkan Peran Masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat serta tupoksi setiap aparatur

3. Memfasilitasi dan memberikan dukungan moral dan finansial kepada setiap aparatur yang ingin meningkatkan kompetensinya
4. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendorong meningkatnya rasa nasionalisme dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan lingkungan
5. Memberikan motivasi dan dukungan kepada masyarakat untuk menggapai prestasi di berbagai bidang

KEBIJAKAN

1. Pembangunan yang lebih tepat sasaran dan terarah dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyampaian aspirasi kebutuhan masyarakat.
2. Mengoptimalkan pelayanan dengan memberdayakan potensi aparatur dan fasilitas yang dimiliki agar tercipta pelayanan prima yang lebih berkualitas, efisien dan efektif di kecamatan dan kelurahan
3. Berperan aktif dalam menggali potensi dan pengembangan kompetensi yang mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan
4. Berperan aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan perayaan penting nasional dan daerah serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan dan lingkungan
5. Berperan aktif dalam menggali potensi dan pengembangan diri masyarakat serta meningkatkan kualitas dan keterampilan di bidang keagamaan

PROGRAM PRIORITAS

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

SASARAN PROGRAM

1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat
2. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan

Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan dan kelurahan.

3. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan

INDIKATOR PROGRAM

1. Persentase Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Memiliki Nilai Kebudayaan, Keagamaan dan Peduli Terhadap Lingkungan
2. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Prima yang Lebih Berkualitas, Efisien dan Efektif di Kecamatan dan Kelurahan
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses dan Tahapan Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kecamatan dan Kelurahan

KEGIATAN/SUBKEGIATAN

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.3.3 Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2 Pengadaan Mebel
 - 1.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.7.5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - 2.2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - 2.3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan
- 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 3.1.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - 3.1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - 3.1.4 Evaluasi Kelurahan
 - 3.2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - 3.2.1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

- 3.3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 3.3.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
- 3.4 Pemberdayaan Mukim
 - 3.4.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim
- 4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 5.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 5.1.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

POHON KINERJA PADA KANTOR CAMAT SIBOLGA UTARA

VISI DAN MISI
KEPALA DAERAH

E
S
E
L
O
N
III

E
S
E

MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT PINTAR DAN MAKMUR

MISI I
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel

TUJUAN
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses dan tahapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan dan Kelurahan
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima yang lebih berkualitas, efisien dan efektif di kecamatan dan kelurahan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang berwibawa, profesional dan amanah
Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang memiliki nilai kebudayaan, keagamaan dan peduli terhadap lingkungan

SASARAN
Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan.
Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan
Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu
Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu
Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat

INDIKATOR KINERJA
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses dan Tahapan Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Prima yang Lebih Berkualitas, Efisien dan Efektif di Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran
Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu
Persentase Penyampaian Pertanggung jawaban keuangan tepat waktu
Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Kelurahan yang Berwibawa, Profesional dan Amanah
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan
Persentase Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Memiliki Nilai Kebudayaan, Keagamaan dan Peduli Terhadap Lingkungan

SEKRETARIS
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan
Penyampaian Dkumen Perencanaan Tepat Waktu
Penyampaian Dokumen Perencanaan Keuangan Tepat Waktu
Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan
INDIKATOR KINERJA
Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran
Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu
Persentase Penyampaian Pertanggung jawaban keuangan tepat waktu
Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan

L
O
N
I
V

KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Pelatihan

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SASARAN STRATEGIS
Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu
INDIKATOR KINERJA
Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu Persentase Penyampaian Pertanggung jawaban keuangan tepat waktu

SEKSI PELAYANAN
SASARAN STRATEGI
Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan
INDIKATOR KINERJA
Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan

SEKSI PEMERINTAHAN, KEAMANAN & KETERTIBAN
SASARAN STRATEGI
Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan
Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat
INDIKATOR KINERJA
Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Pembinaan, Pemasarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat
Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pengelolaan Keragaman Budaya

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SASARAN STRATEGI
Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam proses dan tahapan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kecamatan dan kelurahan
Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan
Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan
Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah Pembinaan, Pemasarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
SASARAN STRATEGI
Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat
Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pengelolaan Keragaman Budaya



**PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
PERJANJIAN KINERJA CAMAT
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SANTI PANGGABEAN, S.H**
Jabatan : Camat Kecamatan Sibolga Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK**
Jabatan : Walikota Sibolga

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA SIBOLGA,

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

**Sibolga, Maret 2025
CAMAT SIBOLGA UTARA.**

SANTI PANGGABEAN, S.H

**PERJANJIAN KINERJA CAMAT
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1 . Meningkatnya Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	1 persen
		2 . Meningkatnya Persentase Partisipasi Masyarakat dalam	1 persen
2	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1 . Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 persen
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1 . Nilai SAKIP Kecamatan	A
4	Terjaganya kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1 . Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	1 persen
		2 . Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	1 persen
		3 . Meningkatnya Persentase masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat, Pemasyarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	1 persen

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.755.417.011	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 884.197.700	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 1.308.055.556	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 19.254.600	APBD
Jumlah		Rp 7.966.924.867	

WALIKOTA SIBOLGA,

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Sibolga, Maret 2025
CAMAT SIBOLGA UTARA

SANTI PANGGABEAN, S.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Edison SM. Lumbantoruan, S.Pi**
Jabatan : Lurah Huta Tonga-tonga

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Santi Panggabean, S.H**
Jabatan : Camat Sibolga Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT SIBOLGA UTARA,

Pihak Pertama,
LURAH HUTA TONGA-TONGA,

SANTI PANGGABEAN, S.H

EDISON SM. LUMBANTORUAN, S.Pi

PERJANJIAN KINERJA

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: KECAMATAN SIBOLGA UTARA
: 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Proses Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1 . Jumlah Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	6 Kali
2	Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 . Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran	90 %
		2 . Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	90 %
3	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	1 . Persentase Penyampaian Laporan Perencanaan	100 %
4	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	1 . Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100 %
5	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1 . Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan	90 %
6	Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Beragama	1 . Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	1 Kali
		2 . Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Keagamaan	2 Kali

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.755.417.011	APBD
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.744.801.875	APBD
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 294.595.300	APBD
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 601.559.836	APBD
	d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.460.000	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 884.197.700	APBD
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 509.197.750	APBD
	b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 374.999.950	APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 391.606.150	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 31.768.984	APBD
	KELURAHAN HUTA TONGATONGA	Rp 359.837.166	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 179.842.827	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 179.994.339	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 19.254.600	APBD
	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 19.254.600	APBD

Sibolga, 02 Januari 2025
LURAH HUTA TONGATONGA,

CAMAT SIBOLGA UTARA,

SANTI PANGGABEAN, S.H

EDISON SM LUMBANTORUAN, S.E



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Jimmy Hendrik Sinaga, S.E**
Jabatan : Lurah Sibolga Ilir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Santi Panggabean, S.H**
Jabatan : Camat Sibolga Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT SIBOLGA UTARA,

Pihak Pertama,
LURAH SIBOLGA ILIR,

SANTI PANGGABEAN, S.H

JIMMY HENDRIK SINAGA, S.E

PERJANJIAN KINERJA

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: KECAMATAN SIBOLGA UTARA
: 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Proses Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1 . Jumlah Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	6 Kali
2	Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 . Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran	90 %
		2 . Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	90 %
3	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	1 . Persentase Penyampaian Laporan Perencanaan	100 %
4	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	1 . Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100 %
5	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1 . Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan	90 %
6	Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Beragama	1 . Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	1 Kali
		2 . Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Keagamaan	2 Kali

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.755.417.011	APBD
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.744.801.875	APBD
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 294.595.300	APBD
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 601.559.836	APBD
	d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.460.000	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 884.197.700	APBD
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 509.197.750	APBD
	b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 374.999.950	APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 278.375.663	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 31.768.984	APBD
	KELURAHAN SIBOLGA ILIR	Rp 246.606.679	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 156.606.679	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 90.000.000	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 19.254.600	APBD
	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 19.254.600	APBD

CAMAT SIBOLGA UTARA,

SANTI PANGGABEAN, S.H

**Sibolga, 02 Januari 2025
LURAH SIBOLGA ILIR,**

JIMMY HENDRIK SINAGA, S.E



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nelly Natalia Purba**
Jabatan : Lurah Angin Nauli

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Santi Panggabean, S.H**
Jabatan : Camat Sibolga Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT SIBOLGA UTARA,

SANTI PANGGABEAN, S.H

Pihak Pertama,
LURAH ANGIN NAULI,

NELLY NATALIA PURBA

PERJANJIAN KINERJA

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

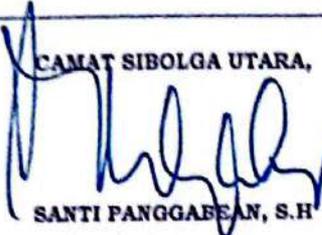
**: KECAMATAN SIBOLGA UTARA
: 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Proses Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1 . Jumlah Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	6 Kali
2	Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 . Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran	90 %
		2 . Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	90 %
3	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	1 . Persentase Penyampaian Laporan Perencanaan	100 %
4	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	1 . Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100 %
5	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1 . Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan	90 %
6	Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Beragama	1 . Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	1 Kali
		2 . Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Keagamaan	2 Kali

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.755.417.011	APBD
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.744.801.875	APBD
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 294.595.300	APBD
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 601.559.836	APBD
	d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.460.000	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 884.197.700	APBD
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 509.197.750	APBD
	b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 374.999.950	APBD

Program	Anggaran	Keterangan
3 . PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 301.611.711	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 31.768.984	APBD
KELURAHAN ANGIN NAULI	Rp 269.842.727	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 179.842.527	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 90.000.200	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
4 . PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 19.254.600	APBD
a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 19.254.600	APBD

CAMAT SIBOLGA UTARA,


SANTI PANGGABEAN, S.H

Sibolga, 02 Januari 2025
LURAH ANGIN NAULI,

NELLY NATALIA PURBA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Netty Irmayanti Sinaga, S.Pi**
Jabatan : Lurah Huta Barangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Santi Panggabean, S.H**
Jabatan : Camat Sibolga Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT SIBOLGA UTARA,

Pihak Pertama,
LURAH HUTA BARANGAN,

SANTI PANGGABEAN, S.H

NETTY IRMAYANTI SINAGA, S.Pi

PERJANJIAN KINERJA

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: KECAMATAN SIBOLGA UTARA
: 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Proses Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1 . Jumlah Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	6 Kali
2	Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 . Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran	90 %
		2 . Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	90 %
3	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	1 . Persentase Penyampaian Laporan Perencanaan	100 %
4	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	1 . Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100 %
5	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1 . Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan	90 %
6	Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Beragama	1 . Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	1 Kali
		2 . Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Keagamaan	2 Kali

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.755.417.011	APBD
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.744.801.875	APBD
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 294.595.300	APBD
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 601.559.836	APBD
	d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.460.000	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 884.197.700	APBD
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 509.197.750	APBD
	b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 374.999.950	APBD

Program	Anggaran	Keterangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 231.768.984	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 31.768.984	APBD
KELURAHAN HUTA BARANGAN	Rp 200.000.000	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 110.000.100	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 89.999.900	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
4 . PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 19.254.600	APBD
a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 19.254.600	APBD

CAMAT SIBOLGA UTARA,

**Sibolga, 02 Januari 2025
LURAH HUTA BARANGAN,**

SANTI PANGGABEAN, S.H

NETTY IRMAYANTI SINAGA, S.PI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dian Kartika Zain, S.E**
Jabatan : Lurah Simaremare

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Santi Panggabean, S.H**
Jabatan : Camat Sibolga Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT SIBOLGA UTARA,

SANTI PANGGABEAN, S.H

Pihak Pertama,
LURAH SIMAREMARE,

DIAN KARTIKA ZAIN, S.E

PERJANJIAN KINERJA

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: KECAMATAN SIBOLGA UTARA
: 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Proses Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	1 . Jumlah Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	6 Kali
2	Meningkatnya Kualitas Pemberian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1 . Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran	90 %
		2 . Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	90 %
3	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	1 . Persentase Penyampaian Laporan Perencanaan	100 %
4	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	1 . Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100 %
5	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1 . Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan	90 %
6	Menciptakan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Beragama	1 . Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keragaman Budaya	1 Kali
		2 . Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Keagamaan	2 Kali

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.755.417.011	APBD
	a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.744.801.875	APBD
	b. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 294.595.300	APBD
	c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 601.559.836	APBD
	d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.460.000	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 884.197.700	APBD
	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 509.197.750	APBD
	b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 374.999.950	APBD

No.	Program	Anggaran	Keterangan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 231.768.984	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 31.768.984	APBD
	KELURAHAN SIMAREMARE	Rp 200.000.000	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 110.000.100	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 89.999.900	APBD & DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 19.254.600	APBD
	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 19.254.600	APBD

CAMAT SIBOLGA UTARA,

SANTI PANGGABEAN, S.H

Sibolga, 02 Januari 2025
LURAH SIMAREMARE,

DIAN KARTIKA ZAIN, S.E



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Fitri Wulandari Hutabarat, S.H**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sibolga Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Santi Panggabean, S.H**
Jabatan : Camat Kecamatan Sibolga Utara

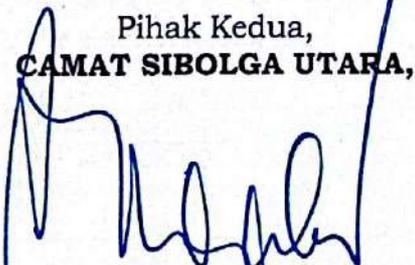
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT SIBOLGA UTARA,


SANTI PANGGABEAN, S.H

Pihak Pertama,
SEKRETARIS,


FITRI WULANDARI HUTABARAT, S.H

PERJANJIAN KINERJA

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: KECAMATAN SIBOLGA UTARA
: 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1 . Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100	persen
		2 . Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	100	persen
2	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100	persen
3	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	100	persen
4	Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas	Jumlah Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Pelatihan	15	orang

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.744.801.875	APBD
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.744.801.875	APBD
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 197.399.900	APBD
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Rp 20.883.800	APBD
b.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 40.594.700	APBD
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 33.693.800	APBD
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 55.857.600	APBD
e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Rp 6.500.000	APBD
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 39.870.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 601.559.836	APBD
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.500.000	APBD
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 80.659.836	APBD
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 516.400.000	APBD
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp -	APBD
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.460.000	APBD
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Rp 88.410.000	APBD
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 21.730.000	APBD
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 4.320.000	APBD

Sibolga,, 02 Januari 2025

KAMAT SIBOLGA UTARA,

SANTI PANGGABEAN, S.H

SEKRETARIS,

FITRI WULANDARI HUTABARAT, S.H



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Anita Dewi Simamora, S.I.P**
Jabatan : Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Fitri Wulandari Hutabarat, S.H**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sibolga Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

FITRI WULANDARI HUTABARAT, S.H

Pihak Pertama,
**KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN,
dan PERLENGKAPAN,**

ANITA DEWI SIMAMORA, S.I.P

PERJANJIAN KINERJA

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: KECAMATAN SIBOLGA UTARA
: 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1.	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1. Persentase Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100	persen
2.	Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas	1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan	100	persen
		2. Jumlah Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Pelatihan	15	orang

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.744.801.875	APBD
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.744.801.875	APBD
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 294.595.300	APBD
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Rp 20.883.800	APBD
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 97.195.400	
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 40.594.700	APBD
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 33.693.800	APBD
	e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 55.857.600	APBD
	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Rp 6.500.000	APBD
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 39.870.000	APBD
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 601.559.836	APBD
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4.500.000	APBD
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 80.659.836	APBD
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 516.400.000	APBD
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.460.000	APBD
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 88.410.000	APBD
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 21.730.000	APBD
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 4.320.000	APBD

SEKRETARIS,

FITRI WULANDARI HUTABARAT, S.H

Sibolga, 02 Januari 2025

KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN
PERLENGKAPAN,

ANITA DEWI SIMAMORA, S.I.P



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rudi Oskar Crismet Leo Patra Pardede, S.I.P**
Jabatan : Kasubbag Program dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Fitri Wulandari Hutabarat, S.H**
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Sibolga Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

FITRI WULANDARI HUTABARAT, S.H

Pihak Pertama,
**KASUBBAG PROGRAM DAN
KEUANGAN,**

RUDI O.C.L. PATRA PARDEDE, S.I.P

PERJANJIAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: KECAMATAN SIBOLGA UTARA
: 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	1 . Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	100	persen
2	Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	1 . Persentase Penyampaian Pertanggungjawaban keuangan tepat waktu	100	persen

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp -	APBD
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp -	APBD

Sibolga, 02 Januari 2025
KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

SEKRETARIS,



FITRI WULANDARI HUTABARAT, S.H



RUDI OSKAR CRISMET LEO PATRA PARDEDE, S.I.P



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Togarma Sinaga, S.Pi**
Jabatan : Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Santi Panggabean, S.H**
Jabatan : Camat Sibolga Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT SIBOLGA UTARA,

Pihak Pertama,
**KASI PEMERINTAHAN,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN,**

SANTI PANGGABEAN, S.H

TOGARMA SINAGA, S.Pi

PERJANJIAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: KECAMATAN SIBOLGA UTARA
: 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1 . Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	100	persen
2	Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1 . Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan	100	persen

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 509.197.750	APBD
	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 509.197.750	APBD

B. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 19.254.600	APBD
	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 19.254.600	APBD

CAMAT SIBOLGA UTARA,

SANTI PANGGABEAN, S.H

Sibolga, 02 Januari 2025
KASI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN

TOGARMA SINAGA, S.Psi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Roma Ruth Marpaung, S.E**
Jabatan : Kasi Pelayanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Santi Panggabean, S.H**
Jabatan : Camat Sibolga Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

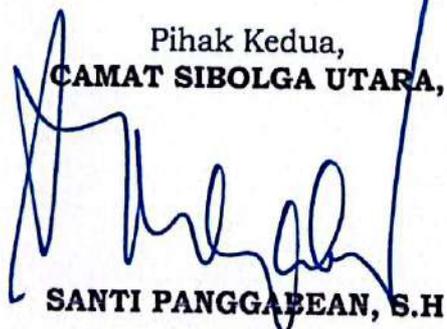
Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,
KASI PELAYANAN,

Pihak Kedua,
CAMAT SIBOLGA UTARA,


SANTI PANGGABEAN, S.H

ROMA RUTH MARPAUNG, S.E

PERJANJIAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: KECAMATAN SIBOLGA UTARA
: 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik di Kecamatan dan di Kelurahan	1 . Persentase Peningkatan Optimalisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan	100	persen
2	Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	1 . Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelurahan	100	persen

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp 374.999.950	APBD
a.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 374.999.950	APBD

Sibolga, 02 Januari 2025
KASI PELAYANAN,

CAMAT SIBOLGA UTARA,



SANTI PANGGABEAN, S.H

ROMA RUTH MARPAUNG, S.E



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Fernando Pasaribu, S.I.P**
Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Santi Panggaban, S.H**
Jabatan : Camat Sibolga Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT SIBOLGA UTARA,

Pihak Pertama,
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL,


SANTI PANGGABEAN, S.H


FERNANDO PASARIBU, S.I.P

PERJANJIAN KINERJA

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: KECAMATAN SIBOLGA UTARA
: 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1.	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1 . Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Masyarakat	3	kali
		2 . Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pengelolaan Keragaman Budaya	250	Orang

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp -	APBD
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp -	APBD

Sibolga, 02 Januari 2025
KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL,

CAMAT SIBOLGA UTARA,

SANTI PANGGABEAN, S.H


FERNANDO PASARIBU, S. I.P



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Citra Yanti Sikumbang**
Jabatan : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Santi Panggabean, S.H**
Jabatan : Camat Sibolga Utara

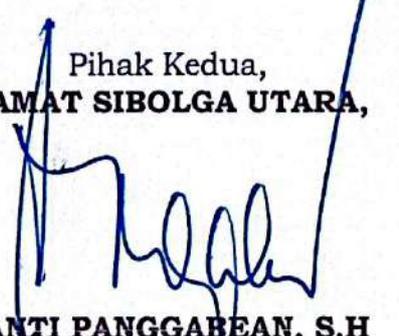
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sibolga, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
CAMAT SIBOLGA UTARA,


SANTI PANGGABEAN, S.H

Pihak Pertama,
**KASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,**


CITRA YANTI SIKUMBANG

PERJANJIAN KINERJA

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN**

**: KECAMATAN SIBOLGA UTARA
: 2025**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan kelurahan	1 . Jumlah Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan yang diselenggarakan Kecamatan dan Kelurahan	6	kali
2	Menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, beragama dan berwawasan lingkungan yang sehat	1 . Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pengelolaan Keragaman Budaya	250	Orang
		2 . Jumlah Pembinaan, Pemasyarakatan Olahraga dan Pelaksanaan Kegiatan Program Hidup Sehat	2	kali

A. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 31.768.984	APBD
	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 31.768.984	APBD

Sibolga, 02 Januari 2025
KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT,

CAMAT SIBOLGA UTARA,


SANTI PANGGABERN, S.H


CITRA YANTI SIKUMBANG